

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PORTOFOLIO

Dosen Pengampu:

Dr.Pujiati,S.Pd.,M.Pd.

Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A.

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Oleh:

Kelompok 10

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Fatria Irawan | 2313031036 |
| 2. Raja Power Samosir | 2313031054 |

KELAS B
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2025

ANALISIS 3 ARTIKEL

ARTIKEL 1

A. Identitas Artikel

Judul : *Pemerintah Dorong Transparansi Keuangan Melalui Integrasi Sistem Digital*

Media : Kompas.com

Penulis : Yoga Hastyadi Widiartanto

Tanggal Publikasi : 2024

B. Analisis Artikel

Analisis ini mengkaji upaya pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan sistem keuangan berbasis digital. Artikel tersebut menyoroti bagaimana digitalisasi bukan hanya sekadar modernisasi teknologi, tetapi sebuah proses perubahan mendasar pada cara pemerintah mengelola anggaran, memantau kinerja, dan menyampaikan informasi kepada publik.

Transformasi digital memungkinkan proses pencatatan keuangan yang selama ini dilakukan secara manual beralih menjadi proses otomatis yang lebih cepat, akurat, dan mudah dilacak. Sistem seperti e-planning, e-budgeting, e-audit, SIPD, dan SIKD memungkinkan setiap transaksi anggaran dan perubahan dokumen tercatat secara real time. Audit trail yang dihasilkan memperkecil ruang manipulasi karena seluruh alur pergerakan data dapat dipantau dan diverifikasi kapan saja.

Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, digitalisasi mendukung implementasi penuh SAP berbasis akrual. Sistem digital membantu pemerintah mencatat pendapatan, belanja, dan beban pada saat terjadinya, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif seperti LO, LPSAL, dan Neraca. Integrasi data juga meningkatkan konsistensi informasi antarinstansi dan mempercepat proses penyusunan laporan.

Artikel tersebut juga menunjukkan bahwa digitalisasi berdampak positif pada penguatan prinsip *value for money*, karena data keuangan yang transparan membantu mengidentifikasi pemborosan, menilai efektivitas program, dan meningkatkan efisiensi belanja negara. Selain itu, masyarakat dapat mengakses

informasi anggaran dengan lebih mudah sehingga mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan publik.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala yang turut dibahas, terutama kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan komitmen kelembagaan. Banyak pemda mengalami kesulitan mengoperasikan sistem digital karena keterbatasan literasi teknologi, kondisi jaringan yang lemah, serta resistensi pegawai terhadap perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi menuntut dukungan kebijakan, anggaran, dan pelatihan yang konsisten.

Jika dikaitkan dengan teori *New Public Management*, artikel ini memperlihatkan bagaimana digitalisasi menjadi elemen penting dalam membangun pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi hasil. Integrasi sistem digital bukan hanya inovasi teknis, tetapi reformasi tata kelola yang memerlukan strategi jangka panjang agar keberlanjutannya terjamin.

C. Komentar Kelompok

Artikel sudah relevan dan informatif, tetapi akan lebih komprehensif jika penulis menyertakan data spesifik terkait tingkat penerapan SIPD atau dampak digitalisasi pada opini WTP di berbagai daerah.

ARTIKEL 2

A. Identitas Artikel

Judul: BPK Soroti Perlunya Auditor Internal Bersertifikat untuk Meningkatkan Akuntabilitas

Media: Antara News

Penulis: Redaksi

Tahun Publikasi: 2024

B. Analisis Artikel

Artikel ini mengangkat isu kompetensi auditor internal sebagai faktor utama dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK menegaskan bahwa auditor internal atau APIP perlu memiliki sertifikasi profesional seperti CIA, QIAP, CFE, atau CPA agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal di tengah meningkatnya kompleksitas keuangan daerah.

Artikel tersebut memaparkan bahwa tingginya temuan audit, terutama di pemda, sebagian besar disebabkan kurangnya kemampuan auditor internal dalam memahami regulasi baru, menilai risiko, dan menerapkan metodologi audit berbasis bukti. Temuan berulang seperti salah saji pencatatan aset, prosedur pengadaan yang tidak taat aturan, serta lemahnya dokumentasi keuangan menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas auditor.

Dengan adanya sertifikasi profesional, auditor internal dipastikan memiliki pemahaman standar mengenai manajemen risiko, audit keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Kompetensi ini membuat mereka lebih siap mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, sehingga kualitas pengendalian intern menjadi lebih kuat.

Artikel ini juga menyinggung keterkaitan antara kualitas APIP dan opini audit BPK. Daerah yang audit internalnya bekerja efektif cenderung mendapatkan opini WTP, sedangkan daerah yang audit internalnya lemah lebih sering memperoleh opini WDP atau TMP. Hubungan ini memperlihatkan bahwa kualitas SDM merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik.

Namun, artikel juga memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemda dalam mendorong auditor memperoleh sertifikasi profesional, seperti keterbatasan anggaran diklat, minimnya insentif, dan kurangnya komitmen organisasi. Banyak instansi belum melihat sertifikasi sebagai kebutuhan mendesak, sehingga jumlah auditor bersertifikat masih jauh dari ideal.

Secara teoritis, pembahasan dalam artikel sejalan dengan prinsip dalam *COSO Internal Control Framework*, yang menekankan pentingnya kualitas personel sebagai komponen inti lingkungan pengendalian. Artikel ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas auditor bukan hanya untuk memenuhi tuntutan audit, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang kredibel dan berintegritas.

C. Komentar Kelompok

Tulisan ini sangat relevan, tetapi masih bersifat normatif. Artikel akan lebih kuat jika penulis menyajikan data konkret, seperti jumlah APIP bersertifikat atau

contoh daerah yang opininya meningkat setelah kompetensi audit internal diperbaiki.

ARTIKEL 3

A. Identitas Artikel

Judul: Mengapa Realisasi Anggaran Daerah Masih Rendah?

Media: Tempo.co

Penulis: Ria Anatasia

Tahun Publikasi: 2023

B. Analisis Artikel

Artikel ini membahas persoalan rendahnya serapan anggaran di berbagai daerah yang masih menjadi hambatan klasik dalam penyelenggaraan pembangunan. Serapan anggaran yang tidak optimal menandakan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan program sesuai rencana tahunan, baik karena permasalahan perencanaan, implementasi, maupun pengawasan.

Artikel tersebut menjelaskan bahwa akar masalah justru terletak pada proses perencanaan yang kurang matang. Penyusunan RKPD sering hanya untuk memenuhi formalitas administrasi, sehingga banyak program tidak memiliki dasar perencanaan yang kuat, dokumen teknis tidak siap, dan kegiatan tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat. Akhirnya, banyak revisi anggaran dilakukan di tengah tahun dan menyebabkan penundaan realisasi.

Selain perencanaan, birokrasi yang berlapis dan lambat turut memperburuk serapan anggaran. Proses pengadaan barang dan jasa menjadi hambatan yang paling sering muncul, terutama karena kurangnya kompetensi pejabat pengadaan, perubahan spesifikasi, atau kendala administrasi. Meskipun digitalisasi pengadaan sudah berjalan melalui LPSE dan SIRUP, implementasinya belum merata dan masih menghadapi kendala teknis maupun SDM.

Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, rendahnya serapan anggaran akan tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai deviasi antara rencana dan pelaksanaan. Deviasi ini harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalK), dan seringkali menjadi salah satu indikator

kelemahan kinerja yang dicatat BPK. Dalam konteks manajemen publik, serapan rendah menunjukkan rendahnya efektivitas program dan lemahnya pengendalian manajemen.

Artikel ini juga menyoroti dampak langsung kepada masyarakat, seperti tertundanya pembangunan infrastruktur, penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat waktu, serta pelayanan publik yang tidak optimal. Hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah dan menurunkan kepercayaan publik.

Komentar Kelompok

Artikel sudah menjelaskan isu dengan baik. Akan lebih informatif jika penulis menambahkan data nyata, seperti daerah dengan serapan terendah atau program yang paling sering tidak terealisasi tepat waktu.

ANALISIS 3 JURNAL NASIONAL

JURNAL NASIONAL 1

A. Identitas Jurnal

Judul : *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*

Jurnal : Jurnal Akuntansi Publik Indonesia

Penulis : Wulandari & Sari

Volume : Vol. 6 No. 2

Tahun : 2022

B. Analisis Jurnal

Penelitian ini menelaah bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berpengaruh terhadap mutu laporan keuangan pemerintah daerah. Pergeseran sistem pencatatan dari basis kas menuju basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 merupakan bagian besar dari agenda reformasi pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, topik penelitian ini memiliki urgensi tinggi baik dari sisi akademis maupun kebijakan. Dalam pengantar jurnal, penulis menyoroti bahwa laporan keuangan daerah memainkan peranan sentral dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

publik. Penggunaan basis akrual dianggap mampu menyediakan informasi yang lebih menyeluruh, akurat, dan relevan. Basis akrual memotret kondisi finansial yang lebih utuh karena mencatat aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang belum direalisasikan dalam kas. Alhasil, gambaran yang disajikan tidak hanya terbatas pada arus kas, tetapi juga kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linear. Sampel penelitian berasal dari 50 pemerintah daerah yang dipilih secara purposive berdasarkan ketersediaan laporan keuangan dan LHP BPK. Variabel bebas yang dianalisis adalah tingkat implementasi SAP berbasis akrual, yang diukur melalui penyusunan Laporan Operasional, Neraca berbasis akrual, penyajian CaLK, kesiapan sistem informasi, serta kompetensi SDM di bidang akuntansi pemerintah. Sementara itu, variabel terikat berupa kualitas laporan keuangan dinilai dari aspek relevansi, keandalan, ketepatwaktuan, dan tingkat keterpahaman.

Hasil penelitian menegaskan bahwa semakin baik penerapan SAP berbasis akrual, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Implementasi akrual mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan pencatatan yang lebih terstruktur, terutama pada pengelolaan aset tetap, pencatatan utang, serta pengakuan beban. Daerah yang melaksanakan pencatatan akrual secara benar cenderung melakukan rekonsiliasi lebih sering dan lebih teliti karena sistem mengharuskan pencatatan atas arus kas dan arus ekonomi sekaligus.

Meski demikian, penulis tetap mengidentifikasi beberapa kendala lapangan. Banyak daerah kesulitan dalam menginventarisasi dan menilai aset tetap secara akurat sehingga nilai aset dalam laporan sering tidak realistik. Kelemahan ini sejalan dengan temuan rutin BPK yang masih sering menemukan ketidakwajaran angka aset daerah.

Aspek lain yang menjadi hambatan adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar pegawai pengelola keuangan bukan lulusan akuntansi sehingga pemahaman terhadap akrual tidak optimal. Jurnal ini menegaskan bahwa penerapan akrual hanya akan efektif jika diikuti peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi teknis.

Selain itu, keterbatasan dukungan teknologi informasi juga menjadi kesulitan nyata. Daerah yang tidak memiliki sistem informasi terintegrasi sering mengalami kesalahan input, keterlambatan proses laporan, serta kesulitan koordinasi antar-OPD. Basis akrual memerlukan sistem yang mampu mengolah data kompleks—sehingga daerah yang minim infrastruktur TI akan mengalami hambatan signifikan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat berbagai literatur yang menyatakan bahwa basis akrual meningkatkan kualitas akuntabilitas fiskal. Akrual memungkinkan pemerintah melihat kewajiban tersembunyi seperti utang transfer, beban pegawai yang belum dibayar, serta depresiasi aset. Informasi seperti ini penting untuk perencanaan anggaran dan pemetaan biaya layanan publik.

C. Komentar Kelompok

Jurnal ini memiliki landasan teori dan metodologi yang baik, serta menyajikan analisis komprehensif. Kekurangannya terletak pada jumlah sampel yang terbatas sehingga kurang mewakili variasi antarwilayah. Meskipun begitu, jurnal ini tetap memberikan kontribusi besar bagi pengembangan kajian akuntansi pemerintahan.

JURNAL NASIONAL 2

A. Identitas Jurnal

Judul : *Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah*

Jurnal : Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi

Penulis : Arum & Prasetyo

Volume : Vol. 9 No. 1

Tahun : 2021

B. Analisis Jurnal

Penelitian ini menelaah hubungan antara efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dengan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah. Di tengah tuntutan transformasi digital di sektor publik, SIA menjadi alat penting untuk meningkatkan efisiensi pencatatan, akurasi data, dan sinkronisasi informasi

antar-unit kerja. Karena itu, topik yang diusung jurnal ini sangat relevan dengan dinamika modernisasi administrasi.

Dalam tinjauan teorinya, penulis mengemukakan bahwa ketepatan waktu merupakan karakteristik fundamental agar laporan keuangan memiliki nilai guna. Informasi keuangan yang terlambat akan kehilangan fungsi karena tidak dapat mendukung keputusan cepat. Dalam konteks pemerintah daerah, ketepatan waktu penyusunan LKPD menyangkut kelancaran audit BPK, penetapan APBD, serta proses perencanaan program.

Studi ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada petugas akuntansi dan pejabat penatausahaan keuangan dari 35 pemerintah daerah. Variabel efektivitas SIA diukur dari aspek keamanan, kemudahan penggunaan, kecepatan pemrosesan, tingkat integrasi unit, dan kemampuan sistem menghasilkan laporan otomatis. Ketepatan waktu pelaporan dinilai dari pengalaman daerah selama tiga tahun terakhir.

Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas SIA memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Daerah yang mengoperasikan SIA secara optimal lebih mampu menyelesaikan pelaporan sebelum tenggat waktu. Hal ini dikarenakan SIA mampu mengurangi human error, mempercepat proses rekonsiliasi, serta mengintegrasikan transaksi dari berbagai OPD dalam satu database.

Penulis juga menjelaskan bahwa sebelum adanya SIA, proses penyusunan laporan banyak mengandalkan manual input sehingga rentan salah dan memakan waktu lama. Pengumpulan bukti transaksi dari OPD sering terlambat dan menjadi kendala besar. Dengan SIA, proses ini menjadi lebih efisien karena setiap unit dapat menginput transaksi secara daring dan sistem memprosesnya otomatis.

Meskipun begitu, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan, seperti rendahnya kemampuan pegawai dalam mengoperasikan teknologi, terutama pegawai senior. Selain itu, beberapa daerah masih mengalami keterbatasan koneksi internet sehingga sistem kerap terganggu. Ada pula risiko keamanan data jika kontrol sistem tidak kuat, misalnya potensi hacking atau manipulasi data.

Penulis menekankan bahwa audit TI menjadi kebutuhan penting untuk memastikan integritas data, keamanan sistem, dan kepatuhan pada SOP. Sayangnya, audit TI belum umum dilakukan karena minimnya auditor internal yang memiliki kompetensi teknis.

C. Komentar Kelompok

Jurnal ini memberikan gambaran mendalam tentang kontribusi teknologi dalam mempercepat pelaporan keuangan. Namun, variabel seperti budaya organisasi dan kepemimpinan kurang dieksplorasi padahal berpotensi mempengaruhi efektivitas SIA. Kendati demikian, jurnal ini tetap memberikan kontribusi berharga bagi wacana digitalisasi sektor publik.

JURNAL NASIONAL 3

A. Identitas Jurnal

Judul : *Analisis Pengendalian Intern untuk Mencegah Fraud dalam Instansi Pemerintah*

Jurnal : Jurnal Ekonomi Publik dan Pemerintahan

Penulis : Hartati

Volume : Vol. 8 No. 3

Tahun : 2020

B. Analisis Jurnal

Jurnal ini mengupas peran pengendalian intern dalam meminimalkan risiko fraud di instansi pemerintah. Dengan menggunakan kerangka COSO, penulis menganalisis elemen-elemen pengendalian intern yang dapat memengaruhi potensi terjadinya kecurangan. Tema ini tetap relevan mengingat kasus korupsi dan penyimpangan anggaran masih banyak ditemukan.

Penelitian memakai metode kualitatif melalui wawancara dengan APIP, bendahara, serta pejabat pengelola keuangan dari beberapa OPD. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa fraud banyak terjadi pada instansi yang memiliki lingkungan pengendalian lemah—misalnya tidak adanya penegakan disiplin, minimnya keteladanan pimpinan, serta budaya kerja yang permisif terhadap manipulasi.

Penulis juga menemukan bahwa pemisahan tugas di banyak instansi masih belum diterapkan secara benar. Ada pegawai yang mengelola kas sekaligus melakukan pencatatan akuntansi, yang membuka peluang penyalahgunaan. Selain itu, fungsi pengawasan berjenjang sering tidak berjalan karena kekurangan auditor internal yang kompeten.

Aktivitas pengendalian seperti otorisasi, pemeriksaan dokumen, dan rekonsiliasi sering kali tidak dijalankan secara konsisten. Banyak dokumen pendukung yang tidak lengkap, yang menyulitkan pembuktian bahwa transaksi dilakukan sesuai prosedur.

Bentuk fraud yang ditemukan tidak hanya berupa penyalahgunaan kas, tetapi juga mark-up belanja, manipulasi aset, hingga penyimpangan pengadaan barang/jasa. Penulis menegaskan bahwa fraud bukan hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi kelemahan sistemik pada mekanisme pengendalian intern.

C. Komentar Kelompok

Jurnal ini memberikan gambaran konkret mengenai akar fraud di instansi pemerintah. Pendekatan wawancara memberi kedalaman analisis, meskipun keterbatasan jumlah narasumber membuat hasilnya sulit digeneralisasi. Walau demikian, jurnal ini relevan untuk pengembangan teori audit intern dan manajemen risiko dalam sektor publik.

ANALISIS 2 JURNAL INTERNASIONAL

JURNAL INTERNASIONAL 1

A. Identitas Jurnal

Judul : *Public Sector Accounting and Financial Management Reform*

Jurnal : International Journal of Public Administration

Penulis : Paul S. Aghion

Tahun : 2022

B. Analisis Jurnal

Artikel ini mengulas reformasi akuntansi sektor publik dan perubahan manajemen keuangan di banyak negara, dengan penekanan pada transisi dari sistem cash basis menuju accrual basis. Penulis menegaskan bahwa peralihan

tersebut bukan hanya pergantian metode pencatatan, tetapi sebuah perubahan menyeluruh yang memengaruhi proses pengelolaan fiskal, perencanaan anggaran, serta mekanisme pertanggungjawaban pemerintah.

Aghion meninjau pengalaman beberapa Kawasan terutama Eropa, Australia, dan Asia untuk menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akrual sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, kesiapan birokrasi, serta ketersediaan regulasi pendukung. Negara-negara maju umumnya berhasil karena memiliki komitmen politik yang kuat dan sistem administrasi yang matang. Sementara itu, negara berkembang cenderung mengalami hambatan struktural seperti lemahnya kompetensi SDM, ketergantungan pada sistem manual, dan infrastruktur teknologi yang masih terbatas.

Menurut penulis, accrual basis memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi keuangan pemerintah karena mencatat seluruh aset, kewajiban, serta beban dan pendapatan yang belum direalisasikan. Hal ini memungkinkan pemerintah menilai kesehatan fiskal secara objektif dan mengelola risiko jangka panjang dengan lebih baik.

Jurnal ini juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan reformasi tidak cukup hanya dari sisi kebijakan. Peningkatan kompetensi pegawai menjadi faktor kunci. Di banyak negara, adopsi akrual dilakukan secara formal tanpa diikuti pelatihan memadai sehingga masih terjadi kesalahan klasifikasi akun, salah penilaian aset, dan ketidaktepatan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Dari sisi tata kelola, penulis menemukan bahwa akuntansi akrual memberikan manfaat besar terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Informasi yang lebih detail memungkinkan pemerintah memperbaiki pengelolaan aset, mengendalikan beban jangka panjang, dan menyusun laporan yang relevan untuk pengambilan keputusan strategis. Hal ini pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

C. Komentar Kelompok

Jurnal ini menyajikan analisis yang jelas dan mendalam mengenai berbagai dinamika reformasi akuntansi sektor publik di sejumlah negara. Pembahasannya kuat dan menyeluruh. Meski begitu, jurnal kurang memberikan contoh kasus nyata dan belum memasukkan aspek digitalisasi yang kini sangat berpengaruh

dalam reformasi akuntansi modern. Walaupun demikian, jurnal ini tetap relevan serta layak dijadikan rujukan akademik.

JURNAL INTERNASIONAL 2

A. Identitas Jurnal

Judul : *Digital Transformation in Government Financial Reporting*

Jurnal : Journal of Public Accounting

Penulis : Mark J. Evans

Tahun : 2023

B. Analisis Jurnal

Artikel ini membahas bagaimana digitalisasi mengubah proses pelaporan keuangan pada sektor pemerintahan. Evans menjelaskan bahwa perkembangan teknologi seperti cloud accounting, blockchain, analitik big data, kecerdasan buatan, dan sistem e-reporting telah menciptakan standar baru dalam praktik akuntansi pemerintah. Transformasi ini bukan hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan keamanan data.

Cloud accounting memudahkan pemerintah dalam menyimpan data secara terpusat serta mempercepat akses informasi antarinstansi. Teknologi blockchain memberikan keamanan tinggi dalam pencatatan karena setiap transaksi tersimpan dalam sistem yang tidak dapat diubah. Sementara itu, kecerdasan buatan membantu menganalisis data keuangan berskala besar untuk memprediksi pola pengeluaran dan pendapatan dalam jangka panjang.

Evans juga menunjukkan bahwa teknologi digital mempercepat penyusunan laporan keuangan. Jika sebelumnya pemerintah perlu melakukan rekonsiliasi manual yang memakan waktu, kini transaksi dapat diolah secara otomatis sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan lebih cepat bahkan secara real-time.

Kendati demikian, digitalisasi juga membawa tantangan baru. Ancaman kejahatan siber menjadi risiko yang harus diantisipasi mengingat data keuangan merupakan informasi sensitif. Selain itu, banyak pegawai pemerintah belum memiliki keterampilan digital yang memadai, sehingga diperlukan pelatihan

intensif. Tingginya biaya implementasi sistem baru juga menjadi kendala yang harus diperhitungkan.

Evans menekankan bahwa digitalisasi tidak akan efektif tanpa reformasi prosedur kerja. Pemerintah perlu menyederhanakan alur administrasi, memperkuat tata kelola data, dan memastikan adanya dukungan penuh dari pimpinan lembaga agar sistem digital benar-benar berfungsi optimal.

Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk mewujudkan pelaporan keuangan pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap dinamika publik.

C. Komentar Kelompok

Jurnal ini memberikan gambaran yang kuat mengenai proses digitalisasi dalam pelaporan keuangan pemerintah serta teknologi yang mendukungnya. Paparannya aktual, runtut, dan mudah dipahami. Namun, jurnal belum membahas sejauh mana kesiapan negara berkembang dalam menerapkan teknologi tersebut. Secara keseluruhan, jurnal ini sangat bermanfaat sebagai referensi perkembangan akuntansi sektor publik di era digital.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

A. Identitas Laporan

Nama Laporan : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pemerintah Daerah : Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun Anggaran : 2023

Status : *Audited* (telah melalui pemeriksaan BPK)

B. Analisis Isi Laporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan memuat komponen penting seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Secara umum, realisasi pendapatan daerah tahun 2023 tercatat tinggi dan menunjukkan kapasitas fiskal yang baik, terutama dari sumber PAD dan dana transfer. Belanja daerah juga terealisasi dengan cukup stabil, meskipun belanja modal masih cenderung rendah karena tantangan dalam proses pengadaan dan kesiapan teknis program. Dari sisi neraca, aset daerah didominasi oleh aset tetap seperti gedung, tanah, dan infrastruktur, dengan beberapa catatan mengenai penataan dan validasi data aset yang masih perlu diperbaiki. Laporan Operasional Tahun 2023 menunjukkan surplus operasional, yang mengindikasikan bahwa pendapatan operasional daerah mampu menanggung beban penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kondisi kas yang stabil, sedangkan arus kas investasi yang negatif menggambarkan belanja pembangunan yang wajar. CALK memberikan rincian tambahan yang memperjelas angka-angka dalam laporan utama, meskipun beberapa rincian aset tetap masih dapat diperkuat. Secara keseluruhan, LKPD Kutai Kartanegara 2023 mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik, transparan, dan akuntabel, meskipun beberapa aspek seperti optimalisasi belanja modal dan penertiban aset tetap masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

C. Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

AUDITED

Dokumen Resmi

NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1.	5.779.589.655.567,00	7.443.525.130.275,00	120,14%	4.443.234.734.944,34
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.	506.101.518.567,00	567.757.276.457,12	112,18%	707.307.156.824,89
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.1.	110.862.683.827,00	142.751.497.519,00	126,76%	114.667.777.995,00
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.2.	5.408.578.566,00	5.332.179.084,00	98,59%	4.008.704.812,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipusatkan	5.1.1.3.	32.120.806.628,00	21.232.144.048,86	66,10%	19.768.619.228,11
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.4.	357.709.468.444,00	394.441.455.805,26	111,39%	568.562.354.789,58
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2.	5.209.738.117.000,00	6.764.446.480.552,00	129,84%	3.615.378.429.670,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.2.1.	6.605.260.415.410,00	6.153.666.018.816,00	113,59%	3.215.256.827.670,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan		4.429.187.061.410,00	5.976.853.751.816,00	134,94%	3.174.738.835.670,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00%	40.517.982.000,00
4.2.1.5	Dana Desa		176.903.354.000,00	179.844.267.000,00	99,91%	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2.	603.477.701.590,00	610.750.461.436,00	101,21%	420.119.802.000,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil		561.162.821.590,00	568.635.581.436,00	101,30%	318.277.302.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan		42.116.880.000,00	42.116.880.000,00	100,00%	81.842.500.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.3.	3.750.000.000,00	111.319.373.766,74	2.946,62%	120.555.348.449,45
4.3.1	Pengeluaran Hibah		3.740.000.000,00	3.033.000.000,00	80,88%	4.626.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Kesiunitan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	102.266.373.766,74	0,00%	116.924.948.449,45
5	BELANJA DAERAH	5.1.2.	6.559.305.838.057,00	5.475.960.549.797,73	83,50%	4.714.130.498.075,44
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.	4.359.530.414.599,00	3.672.260.131.103,80	84,24%	3.283.287.430.391,43
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	1.906.288.638.947,00	1.660.706.849.284,31	87,12%	1.666.499.767.314,35
5.1.2	Belanja Bantuan dan Jasa	5.1.2.1.2.	2.301.703.199.313,00	1.904.457.460.899,17	82,74%	1.557.300.916.067,00
5.1.4	Belanja Sumbang	5.1.2.1.3.	464.050.000,00	96.194.315,00	20,30%	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.4.	126.445.726.339,00	90.036.576.606,32	71,21%	58.453.247.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5.	24.828.890.000,00	16.974.050.000,00	68,92%	1.033.300.000,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2.	1.533.375.706.328,00	1.171.734.721.349,93	76,42%	1.026.367.434.969,01
5.2.1	Belanja Modal Tersedia	5.1.2.2.1.	26.833.778.687,00	22.828.252.727,00	85,07%	35.358.489.143,00
5.2.2	Belanja Modal Penetapan dan Mewar	5.1.2.2.2.	438.187.785.606,00	273.027.320.037,73	92,31%	234.889.068.195,01
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	201.129.156.559,00	187.440.691.172,25	66,65%	221.868.615.076,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Infrastr	5.1.2.2.4.	768.832.742.639,00	672.563.911.292,00	87,48%	548.103.072.658,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	13.022.240.837,00	15.874.345.376,00	93,26%	6.028.188.897,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya		1.250.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.	41.196.290.000,00	10.217.074.540,00	26,01%	84.714.812.822,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		41.196.290.000,00	10.217.074.540,00	26,01%	84.714.812.822,00
5.4	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.	624.103.457.130,00	621.239.622.804,00	99,54%	319.782.819.903,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan		624.103.457.130,00	621.239.622.804,00	99,54%	319.782.819.903,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.6.	0,00	2.806.136.492.965,82	0,00%	842.366.182.490,95

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Keuangan secara keseluruhan.



NO. URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4.				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1.	842.366.182.490,00	842.321.892.487,69	99,59%	1.137.661.945.621,05
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		842.366.182.490,00	842.321.892.487,69	99,59%	1.137.661.945.621,05
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2.	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00%	24.400.000.000,00
6.2.2	Penyerahan Modal Daerah		3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00%	24.400.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.5.	838.616.182.490,00	838.571.882.487,69	99,59%	1.113.261.945.621,05
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.6.	0,00	2.806.136.492.965,82	0,00%	842.366.182.490,95



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.	842.366.182.489,95	1.137.649.704.118,87
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2.	842.321.882.487,69	1.137.661.945.621,05
Sub Total		44.300.002,26	-12.241.502,18
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3.	2.806.136.462.965,82	842.366.182.489,95
Sub Total		2.806.180.762.968,08	842.353.940.987,77
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4.	-44.300.002,26	12.241.502,18
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5.	2.806.136.462.965,82	842.366.182.489,95

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	REF	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAOKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL						
7	PENDAPATAN - LO	5.4.1.	7.949.331.646.360,98	4.223.152.104.517,61	3.726.179.541.843,37	88,23%
7. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1.	582.018.698.961,79	629.803.299.549,16	-47.587.600.587,37	(7,56%)
7. 1. 1	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1.	147.214.974.184,51	121.877.101.389,51	25.337.872.795,10	20,79%
7. 1. 2	Rohitas Daerah-LO	5.4.1.1.2.	6.012.230.784,00	4.795.079.537,00	1.217.151.247,00	25,38%
7. 1. 3	Hasil Pengembalian Kekurangan Daerah yang Diperbaiki-LO	5.4.1.1.3.	77.818.885.429,38	-33.773.138.558,96	111.502.023.988,34	(33,04%)
7. 1. 4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4.	350.973.609.563,80	536.706.257.101,62	-185.734.640.617,82	(34,61%)
7. 2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2.	3.219.766.551.665,00	3.461.945.170.974,00	3.757.821.380.691,00	108,55%
7. 2. 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1.	5.524.326.465.819,00	3.021.917.246.384,00	3.502.409.219.435,00	115,80%
7. 2. 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2.	695.449.095.846,00	440.027.924.590,00	255.412.161.256,00	58,04%
7. 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	5.4.1.3.	147.545.385.734,19	131.599.633.994,45	16.945.761.739,74	12,12%
7. 3. 1	Pendapatan Hutan-LO		39.259.021.967,45	15.674.689.545,00	23.584.336.422,45	150,46%
7. 3. 2	Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00%
7. 3. 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah-LO		108.286.373.766,74	115.924.948.449,45	-7.639.574.682,71	(6,59%)
B	BEBAN	5.4.2.	5.320.361.757.721,44	4.704.991.741.263,92	615.370.016.457,52	13,08%
B. 1. 1	Beban Pegawai	5.4.2.1.1.	1.677.457.165.172,60	1.657.196.979.765,83	20.260.185.406,73	1,22%
B. 1. 2	Beban Persediaan	5.4.2.1.2.	800.906.626.918,05	546.048.294.755,89	254.858.332.162,16	46,61%
B. 1. 2	Beban Jasa	5.4.2.1.3.	853.180.432.449,60	748.510.616.153,73	104.669.816.295,95	13,98%
B. 1. 2	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4.	112.176.591.608,70	46.599.601.523,85	65.576.990.084,85	140,72%
B. 1. 2	Beban Peralatan Dinas	5.4.2.1.5.	188.442.170.567,00	119.632.155.677,00	68.810.014.890,00	57,52%
B. 1. 3	Beban Biaya		0,00	0,00	0,00	0,00%
B. 1. 4	Beban Subsidi	5.4.2.1.6.	94.784.315,00	0,00	94.784.315,00	0,00%
B. 1. 5	Beban Hibah	5.4.2.1.7.	90.036.576.606,32	58.453.247.000,00	31.583.329.808,32	54,03%
B. 1. 6	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.8.	16.974.050.000,00	1.033.500.000,00	15.940.550.000,00	1.542,39%
B. 1. 7	Beban Pembiayaan Putung	5.4.2.1.9.	9.681.205.988,17	5.003.188.720,38	4.678.017.268,79	93,90%
B. 1. 8	Beban Lain-lain		0,00	53.193.529.744,44	-53.193.529.744,44	(100,00%)
B. 2. 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.1.10.	160.491.822.538,01	140.253.710.599,28	20.238.111.938,73	14,43%
B. 2. 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.1.10.	125.639.085.853,00	124.340.559.587,00	1.298.526.266,00	1,04%
B. 2. 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Infrastruktur	5.4.2.1.10.	650.127.058.581,97	870.048.862.948,74	-219.921.764.366,83	(25,28%)
B. 2. 4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.1.10.	327.648.638,00	363.151.505,00	-41.504.867,00	(11,43%)
B. 2. 5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.1.10.	0,00	0,00	0,00	0,00%
B. 2. 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.1.10.	13.593.467.680,00	14.553.523.379,78	-960.066.899,78	(6,66%)
B. 3. 1	Beban Transfer	5.4.2.2.	621.239.622.804,00	319.760.019.903,00	301.478.002.301,00	94,28%
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3.	2.628.969.889.639,54	-481.839.636.746,31	3.110.809.525.385,85	(645,61%)

NO-URUT	URAIAN	REF	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	P%
KEGIATAN NON OPERASIONAL						
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		172.634.127.320,98	52.598.068.799,00	120.036.068.521,98	228,21%
7.4.2	-Surplus Penyelenggaraan Kewajiban Jangka Panjang-LO		-35.312.859,60	0,00	-35.312.859,60	0,00%
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		172.634.127.320,98	52.598.068.799,00	120.036.068.521,98	228,21%
8.5.2	-Defisit Penyelenggaraan Kewajiban Jangka Panjang-LO		-5.385.654.371,50	-2.833.108.910,83	-8.218.763.282,73	(290,10%)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.4.4.	5.420.987.231,50	-2.833.108.910,83	8.254.096.142,33	(291,34%)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			2.634.390.875.871,04	-484.672.745.657,14	3.119.063.621.528,18	(643,54%)
POS LUAR BIASA						
8.4.1	Beban Tak Terduga		10.717.074.540,00	73.312.760.854,00	-62.595.686.314,00	(85,38%)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		5.4.5.	-10.717.074.540,00	-73.312.760.854,00	-62.595.686.314,00	(85,38%)
SURPLUS/DEFISIT LO		5.4.6.	2.623.673.801.331,04	-557.985.506.511,14	3.181.659.307.842,18	(570,20%)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
EKUITAS AWAL	5.6.1.	16.466.333.996.057,90	16.885.104.998.025,80
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2.	2.623.673.801.331,04	-557.985.506.511,13
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3.		
Koreksi Ekuitas		-163.221.370.692,84	139.214.504.543,18
EKUITAS AKHIR		18.926.786.426.696,10	16.466.333.996.057,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1.		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.	2.370.160.763.615,20	461.998.017.240,74
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2.	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3.	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4.	244.795.626.461,14	373.222.686.262,90
Kas Dana BOS	5.3.1.1.5.	1.147.556.683,28	6.911.281.174,92
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.6.	185.162.922,57	509.125.662,20
Setara Kas	5.3.1.1.7.	190.000.000.000,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.7.1.	86.885.591.278,82	90.928.191.633,43
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.7.2.	13.148.781.662,00	12.468.729.962,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.7.3.	23.087.071.064,68	69.373.829.477,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.7.4.	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.7.5.	157.914.177.000,00	73.224.552.590,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.8.	2.401.117.165,00	2.576.220.952,07
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.9.	-67.185.059.988,51	-66.133.242.168,77
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.10.	8.215.275.069,96	8.265.856.428,97
Persediaan	5.3.1.1.11.	90.385.646.096,66	218.281.086.129,12
JUMLAH ASET LANCAR		3.121.141.709.030,80	1.251.626.335.344,58
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		19.182.188.048,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	19.320.538.327,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		19.182.188.048,00	19.320.538.327,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2.		
Penyertaan Modal		857.538.077.444,13	688.604.488.989,78
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		857.538.077.444,13	688.604.488.989,78
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		876.720.265.492,13	707.925.027.316,78
ASET TETAP	5.3.1.3.		
Tanah	5.3.1.3.1.	2.249.451.468.281,21	2.249.427.568.334,21
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2.	2.828.747.768.021,67	2.654.736.744.278,82
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3.	6.502.281.379.358,65	6.408.992.395.786,34
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4.	14.404.735.356.619,30	13.751.586.316.772,50
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	445.538.778.338,72	444.589.681.398,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6.	1.478.362.674.785,16	1.492.457.170.468,27
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	-13.566.850.053.686,70	-12.757.106.862.708,20
JUMLAH ASET TETAP		14.342.267.371.718,00	14.244.683.014.330,70
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.4.		
Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1.	52.566.907.216,07	52.566.907.216,07
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.2.	61.975.335.876,00	61.975.335.876,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3.	178.867.194.647,14	164.570.156.657,14
Aset Lain-lain	5.3.1.4.4.	648.805.210.764,82	358.487.883.387,79
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.5.	-141.501.123.892,14	-123.975.069.698,14
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		800.713.524.611,89	513.625.213.438,86
JUMLAH ASET		19.140.842.870.852,80	16.717.859.590.430,90

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
KEWAJIBAN	5.3.2.		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	5.3.2.1.1.	52.241.894,37	235.590.850,81
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2.	83.964.032.437,33	104.826.379.278,19
Utang Belanja	5.3.2.1.3.	79.841.017.976,94	61.290.057.958,92
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4.	50.199.151.848,02	85.173.566.285,07
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		214.056.444.156,66	251.525.594.372,99
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		214.056.444.156,66	251.525.594.372,99
EKUITAS	5.3.4.		
EKUITAS		18.926.786.426.696,10	16.466.333.996.057,90
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		19.140.842.870.852,80	16.717.859.590.430,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1.		
Pendapatan Pajak Daerah		142.751.497.519,00	114.967.277.995,00
Pendapatan Retribusi Daerah		5.332.179.084,00	4.008.704.812,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		21.232.144.048,86	19.768.619.228,31
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		398.289.511.605,26	566.544.301.789,58
Dana Bagi Hasil Pajak		5.193.110.973.145,00	2.375.059.171.144,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0,00	0,00
Dana Alokasi Umum		443.970.394.500,00	443.413.042.000,00
Dana Alokasi Khusus		339.772.383.971,00	356.266.622.526,00
Dana Penyesuaian/DID		0,00	40.517.992.000,00
Dana Desa		176.844.267.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		568.635.581.436,00	318.277.302.000,00
Bantuan Keuangan Lainnya		42.114.880.000,00	81.842.500.000,00
Pendapatan Lainnya		108.286.373.766,74	115.924.948.449,45
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		3.033.000.000,00	4.626.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		7.443.373.186.075,86	4.441.216.481.944,34
Arus Kas Keluar	5.5.1.2.		
Belanja Pegawai		1.660.706.849.284,31	1.666.499.767.314,35
Belanja Barang		1.904.457.460.898,17	1.557.300.916.067,08
Belanja Bunga		0,00	0,00
Belanja Subsidi		94.194.315,00	0,00
Belanja Hibah		90.036.576.606,32	58.453.247.000,00
Belanja Bantuan Sosial		16.974.050.000,00	1.033.500.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		621.239.622.804,00	319.760.819.903,00
Belanja Tak Terduga		10.717.074.540,00	84.714.812.822,00
Jumlah Arus Kas Keluar		4.304.225.828.447,80	3.687.763.063.106,43
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		3.139.147.357.628,06	753.453.418.837,91
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1.		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		110.684.200,00	1.475.433.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		41.260.000,00	542.820.000,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		151.944.200,00	2.018.253.000,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2.		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Belanja Tanah		22.828.252.727,00	15.358.489.143,00
Belanja Peralatan dan Mesin		273.027.320.037,73	234.889.069.195,01
Belanja Bangunan dan Gedung		187.440.891.917,20	221.986.615.076,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		672.563.911.292,00	548.105.072.658,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		15.874.345.376,00	6.028.188.897,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.171.734.721.349,93	1.026.367.434.969,01
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-1.171.582.777.149,93	-1.024.349.181.969,01
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1.		
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Arus Kas Keluar	5.5.3.2.	0,00	
Penyerapan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		3.750.000.000,00	24.400.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		3.750.000.000,00	24.400.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-3.750.000.000,00	-24.400.000.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1.		
<i>Penerimaan PFK Tahun Berjalan :</i>			
BUD		398.481.172.123,60	341.357.347.651,00
SKPD		17.977.317.036	10.526.921.905,81
Puskesmas		0,00	0,00
BLUD		0,00	0,00
<i>Penerimaan Transitoris:</i>			
Pendapatan atas belanja yang belum dibayarkan		103.655.322,00	39.355.000,00
Kas Bendahara BOSKAB		0,00	6.488.666,20
Pengembalian Panjar Kepada PPTK		0,00	11.620.130,00
Koreksi Kas BOSNAS		14.494.800,26	5.752.835,98
Penerimaan atas Pembukaan Rekening yang telah ditutup		68.248,84	0,00
Penerimaan Kembali Kesalahan Pendebetan Bank		18.000,00	36.280.220,00
Jumlah Arus Kas Masuk		416.576.725.530,87	351.983.766.408,99
Arus Kas Keluar	5.5.4.2.		
<i>Pengeluaran PFK Tahun Berjalan :</i>			
BUD		398.506.346.376,60	341.357.347.651,00
SKPD		18.039.239.456	10.670.474.215,42
PUSKESMAS		0,00	0,00
BLUD		0,00	0,00
<i>Pengeluaran Transitoris:</i>			
Pendapatan atas belanja yang Telah dibayarkan		39.355.000,00	0,00
Pengeluaran Hutang Jangka Pendek Lainnya SKPD Tahun Berjalan		0,00	9.396.412.260,38
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya BUD		96.252.283,78	0,00
Koreksi PMK		51.797.879,00	0,00
Kesalahan Bank dalam melakukan debet rekening		0,00	18.000,00
Pemberian Panjar Kepada PPTK		3.250.500,00	0,00
Pengakuan atas koreksi kas PFK Puskesmas		0,00	0,00
Koreksi atas Kas Bendahara BOSKAB		7.065.172,36	127.705.247,20
Jumlah Arus Kas Keluar		416.743.306.667,57	361.551.957.374,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		-166.581.136,70	-9.568.190.965,01
Kenaikan / Penurunan Kas	5.5.5.	1.963.647.999.341,43	-304.863.954.096,11
Saldo Awal Kas		842.641.110.340,76	1.147.505.064.436,87
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD DAN JKN	5.5.6.	2.806.289.109.682,19	842.641.110.340,76
Terdiri dari			
Kas di Kas Daerah		2.370.160.763.615,20	461.998.017.240,74
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		244.795.626.461,14	373.222.686.262,90
Kas di Bendahara BOS		1.147.556.683,28	6.911.281.174,92
Kas Lainnya		185.162.922,57	509.125.662,20
Setara Kas		190.000.000.000,00	0,00
TOTAL SALDO KAS	5.5.7.	2.806.289.109.682,19	842.641.110.340,76

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KELUANGAN
SKPD : 5-02-0-00-0-00-02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Unit Organisasi : 5-02-0-00-0-00-02.000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-02-0-00-0-00-02.000-001 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
A	PENDAPATAN DAERAH	8.000.685.014.000,00	7.965.799.584.804,61	93,63	6.821.013.567.524,37
A.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.03.257.708.585,00	691.803.788.396,61	94,92	6.3.532.487.412,37
A.1.01	Pajak Daerah	0,00	0,00	0	0,00
A.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipakai	20.000.000.000,00	63.147.001.956,98	95,21	21.252.148.048,80
A.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	120.257.708.645,00	98.445.983,8.01,02	98,29	32.303.343.823,80
A.2	PENDAPATAN TRANSFER	6.180.369.371.643,00	6.891.579.371.212,00	93,19	6.764.446.490.052,00
A.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.510.969.526.969,00	6.726.083.454.899,00	81,92	6.153.090.079.016,00
A.2.01.01	Dana Peningkatan	0,00	21.486.718.000,00	0	0,00
A.2.01.02	Dana Investasi Daerah (DID)	189.954.413.000,00	792.420.417.000,00	902,05	178.844.287.000,00
A.2.01.05	Dana Otonomi	874.480.018.675,00	869.495.078.217,00	98,87	810.730.487.438,00
A.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	8.000.000.000,00	8.217.375.078.217,00	100,00	5.648.835.987.438,00
A.2.02.01	Pendapatan Raya Hasil	30.120.000.000,00	36.120.000.000,00	100,00	42.114.000.000,00
A.2.02.02	Bantuan Keuangan	90.037.726.400,00	12.526.493.142,00	14,00	3.013.000.000,00
A.2.02.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.614.000.000,00	3.087.000.906,00	65,19	3.013.000.000,00
A.2.03	Pendapatan Hibah	4.182.708.400,00	8.099.466.542,00	215,18	2,00
A.2.03.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0,00	881.070.000,00	100,00	0,00
B	BELANJA DAERAH	880.982.715.783,00	881.070.000.000,00	91,60	778.844.287.000,00
B.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.328.871.826,00	0,00	0,00	0,00
B.3.01	Belanja Tetap Tidak Duga	21.328.871.826,00	0,00	0,00	0,00
B.4	BELANJA TRANSFER	870.368.403.897,00	881.070.000.000,00	100,00	778.844.287.000,00
B.4.03	Bantuan Keuangan	870.368.403.897,00	881.070.000.000,00	100,00	778.844.287.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	1.660.652.738.245,00	8.284.030.000.306,67	91,65	6.944.369.793.524,37
C.1	PEMBAYARAN PEMBAYARAN	2.858.138.462.990,00	2.806.127.071.300,02	99,00	842.214.453.918,79
C.1.01	Sisa Laba Penitiban Anggaran Tahun Sebelumnya	2.806.138.462.990,00	2.806.127.071.300,02	100,00	842.214.453.918,79
C.2	PENGELUARAN PEMBAYARAN	100.014.000.000,00	100.014.000.000,00	100,00	1.700.000.000,00
C.2.02	Penyertaan Modal Daerah	100.014.000.000,00	100.014.000.000,00	100,00	1.700.000.000,00
	PEMBAYARAN NETTO	2.700.632.462.990,00	2.700.253.071.300,02	99,99	818.384.453.918,79
	SISA LEbih / Kurang PEMBAYARAN TAHUN BERKEJALAN	16.386.955.201.211,00	8.886.882.013.312,42	56,65	7.482.734.163.384,11

Powered by: Sistem-Ang | v1

